

Komunikasi Pembangunan dalam Implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Cirebon

Rostiena Pasciana^a, R. Ismira Febrina^b,
Ieke Sartika Iriany^c, Lia Juliasih^d, Mila Karmila^e

^{a,d,e} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut

^b Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informasi Universitas Garut

^c Pascasarjana Universitas Garut

e-mail : ^a rostiena_pasciana@fisip.uniga.ac.id, ^b ismirafebrina@uniga.ac.id,

^c sartikaieke@gmail.com, ^d liajuliasih@fisip.uniga.ac.id,

^e milakarmila14@fisip.uniga.ac.id

Abstrak

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana terbukti dari meningkatnya kasus kekerasan yang tercatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi pembangunan dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan dalam implementasi DRPPA di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan sudah baik. Terbukti dengan dua desa yang merupakan *pilot project* di Kabupaten Cirebon sudah menerapkan DRPPA melalui berbagai kegiatan dan hampir semua indikator DRPPA tercapai. Program ini menjadi strategi percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan di desa, didukung oleh kepemimpinan, koordinasi, serta komunikasi yang efektif antara Kepala Desa dan para pemangku kepentingan terkait, dengan melibatkan Relawan SAPA sebagai garda terdepan. Namun demikian, agar lebih optimal diperlukan upaya untuk meningkatkan indikator kesadaran masyarakat mengenai pola pengasuhan yang baik, serta meningkatkan keterwakilan perempuan di desa. Selain itu juga, untuk keberlanjutan program ini diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan komitmen dari berbagai pihak, kerja sama melalui pendekatan Pentahelix, terutama dari sektor swasta untuk memberikan kontribusi finansial, serta optimalisasi peran media dalam meningkatkan kesadaran dan membentuk opini positif di masyarakat.

Kata Kunci: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA); komunikasi pembangunan; pemberdayaan perempuan; perlindungan anak

Development Communication in the Implementation of Women-Friendly and Child-Caring Village Program in Cirebon Regency

Abstract

The Indonesian government faces significant challenges in addressing issues related to the protection of women and children, as evidenced by the increasing number of violence cases recorded by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA). This study aims to analyze development communication in realizing Women- and Child-Friendly Villages (DRPPA) in Cirebon Regency. The study uses a qualitative method and a case study approach. The results show that development communication in implementing DRPPA in Cirebon Regency can be considered effective. This is evidenced by the two villages that serve as pilot projects in Cirebon Regency, which have implemented DRPPA through various activities and have achieved nearly all DRPPA indicators. This program has become a strategy for accelerating sustainable development in the village, supported by leadership, coordination, and effective communication between village heads and relevant stakeholders, with SAPA volunteers playing a frontline role. However, to optimize results, efforts are

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

needed to enhance community awareness of good parenting practices and to improve the representation of women in the village. Additionally, for the sustainability of this program, regular monitoring and evaluation are required, as well as increased commitment from various parties, collaboration through the Pentahelix approach—particularly from the private sector to provide financial contributions—and optimization of the media's role in raising awareness and shaping positive public opinion.

Keywords: *Child-Friendly and Women-Caring Villages (DRPPA); development communication; women's empowerment; child protection.*

A. PENDAHULUAN

Perempuan dan anak dikatakan rentan dan berisiko menjadi korban dalam situasi konflik. Fakta lapangan tentang perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak yang rentan terhadap ketidakadilan, sering ditemukan. Antara Januari dan November 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 1.290 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan fisik adalah kasus yang paling umum, diikuti oleh kekerasan seksual dan tindak pidana penjualan orang (TPPO) yang melibatkan perempuan dan anak (Naufal, 2004).

Salah satu urgensi upaya untuk pemenuhan hak perempuan dan anak dan membantu menyelesaikan isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak, KemenPPA meluncurkan program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat DRPPA) yang dituangkan dalam Keputusan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 70 tahun 2021 (Jdih.kemenpppa.go.id, 2021). Pengembangan model DRPPA ini berangkat dari Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bermunculan berkaitan dengan isu perlindungan Perempuan dan anak berbasis desa.

Desa memegang peran krusial dalam proses pembangunan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan (Damayanti et al., 2023). DRPPA

itu sendiri merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan (Ansori, 2021).

Dalam pelaksanaan DRPPA, terdapat sepuluh indikator yang harus dicapai; lima indikator berkaitan dengan kesiapan kelembagaan desa, dan lima indikator lainnya merupakan substansi prioritas KemenPPA, yang merupakan lima arahan presiden. Kelima arahan tersebut yakni pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak (Rosalin, L. N., Handayani, R., Wikantosa, B., Misiyah, & Zulminarni, N., 2021). Dengan digencarkannya program DRPPA ini, diharapkan desa dapat menciptakan suasana aman bagi masyarakatnya, terutama perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan menyediakan fasilitas dan sarana publik yang ramah perempuan dan anak. (Fatimah et al., 2023).

Dari 138 lokasi *pilot project* DRPPA yang tersebar di seluruh Indonesia, dua desa di Kabupaten Cirebon ditunjuk oleh KemenPPA sebagai wilayah *pilot project*, yaitu Desa Babakan Gebang di Kecamatan Babakan dan Desa Purbawinangun di Kecamatan Plumbon.

Program DRPPA ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *pencapaian Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa; yang berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

berkelanjutan di Indonesia. Program DRPPA secara langsung mendukung beberapa tujuan SDGs, terutama pilar 5 (Kesetaraan Gender) dan pilar 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) (Fitrah, 2024).

Keberhasilan program DRPPA memerlukan sinergi dari berbagai pihak di tingkat desa, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, organisasi masyarakat, pendamping desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan anak, serta seluruh masyarakat desa. Setiap elemen ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan desa yang inklusif dan peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, partisipasi ini harus diorganisasi dalam beberapa program kerja yang relevan dan terstruktur. Program-program ini disusun dengan tujuan untuk mengaktualisasikan DRPPA sebagai bentuk tanggung jawab desa dalam mendukung dan mengawal program pemerintah yang lebih luas (Fatimah et al., 2023).

Dalam konteks ini, pendekatan pentahelix yang melibatkan lima elemen utama (pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor bisnis, dan media) memainkan peran yang sangat strategis. Pentahelix menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengkoordinasikan berbagai upaya dan memaksimalkan dampak dari program DRPPA.

Namun, agar implementasi DRPPA dan tujuan SDGs dapat tercapai secara optimal, komunikasi pembangunan memainkan peran penting. Komunikasi pembangunan adalah aktivitas penyampaian dan pertukaran pesan yang timbal balik antara pemangku kepentingan dan semua unsur yang terlibat (Sumarwan et al., 2024). Tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan, serta memastikan keberlanjutan dan pengembangan partisipasi tersebut secara berkesinambungan (Puspaningrum et al., 2023). Strategi komunikasi pembangunan yang efektif melibatkan beberapa langkah, antara lain: perencanaan yang matang, penetapan sasaran dan tujuan penyampaian pesan, pembentukan

pesan yang sesuai dengan tujuan, pemilihan jenis media yang efektif dan sesuai sasaran, serta melakukan evaluasi akhir dari hasil strategi yang diterapkan (Armawan, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi pembangunan dalam implementasi program DRPPA di Kabupaten Cirebon.

B. METODE

Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan program DRPPA dan komunikasi pembangunan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mempelajari interaksi lingkungan, posisi, dan keadaan lapangan secara menyeluruh yaitu dua desa *pilot project* DRPPA di Kabupaten Cirebon; Desa Purbawinangun dan Desa Babakan Gebang. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dicatat dan dianalisis sebagai contoh atau bukti dalam menganalisis kasus yang relevan dengan fokus penelitian. (Josua, 2023). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu implementor DRPPA yang ada di dua desa tersebut.

C. PEMBAHASAN

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Program DRPPA di Kabupaten Cirebon telah diimplementasikan sejak tahun 2022. Menurut Kepala Bidang Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, terpilihnya Desa Purbawinangun dan Desa Babakan Gebang sebagai *pilot project* DRPPA karena Kepala Desanya adalah perempuan. Pemimpin perempuan dinilai lebih peduli dan lebih baik dalam penanganan kasus yang menimpa perempuan dan anak (Ghofar, 2022). Selain itu, pada kedua desa tersebut perempuan dan anaknya memiliki potensi untuk diberdayakan.

Dalam implementasi berbagai kebijakan; termasuk DRPPA, komunikasi menjadi salah satu unsur penting yang menentukan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

keberhasilannya (Juliasih et al., 2023). Komunikasi bukan hanya transmisi informasi, tapi juga gagasan, emosi, keterampilan dengan menggunakan simbol-simbol berupa kata-kata, gambar, figure, grafik dll (Iyoeaga, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, program DRPPA menimbulkan berbagai dampak positif, diantaranya masyarakat menjadi lebih *aware* dan terbuka untuk *speak up* masalah kekerasan. Dari DRPPA ini dibentuk Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) sebagai mitra strategis pemerintah yang berkomitmen untuk memberikan kepeduliannya terhadap perempuan dan anak di desa. Selain memberdayakan perempuan di desa, relawan SAPA juga dapat memberikan konseling pada warga terkait masalah-masalah yang terjadi pada perempuan dan anak untuk dapat dibantu dicarikan solusinya.

Adapun kondisi pada kedua desa *pilot project* ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Capaian 10 Indikator DRPPA pada Dua Desa *Pilot Project* DRPPA di Kabupaten Cirebon

Indikator	Desa Purbawinangun	Desa Babakan Gebang
1	Pengorganisasian perempuan dan anak: <ul style="list-style-type: none"> • Relawan SAPA berjumlah 10 orang • Kelompok Wanita Tani • PKK 	Pengorganisasian perempuan dan anak: <ul style="list-style-type: none"> • Relawan SAPA berjumlah 11 orang • Satgas PMI • Forum Anak
2	Tersedianya data pilah perempuan dan anak	Tersedia data pilah perempuan dan anak
3	Tersedianya <ul style="list-style-type: none"> • Perdes DRPPA • Perdes anggaran desa untuk DRPPA • Perdes tentang Perkawinan Anak sedang proses • Perdes Struktur organisasi dan Tata Kelola 	Tersedianya Perdes DRPPA
4	Anggaran DRPPA tahun pertama (2022) dari Kementerian PPA sebesar 10 juta. Tahun 2023 dan 2024 dari Dana Desa -pun dialokasikan 10 juta	Anggaran DRPPA tahun pertama (2022) dari Kementerian PPA sebesar 5 juta, tahun selanjutnya 2023 dan 2024 alokasi dana desa untuk DRPPA ini sebesar 10 juta per tahun; alokasi untuk

	per tahun untuk operasional.	wirusaha perempuan 30%
5	Keterwakilan perempuan di pemerintahan desa dan organisasi Lembaga permusyawaratan desa dan Lembaga kemasyarakatan desa telah mencapai 30%	Keterwakilan perempuan pada berbagai organisasi di desa sekitar 25%. Seperti BPD, serta Ketua RT dan ketua RW banyak yang perempuan. Namun untuk posisi puncak masih terbilang sedikit
6	Perempuan Wirusaha di desa semakin meningkat dengan didukung berbagai program pelatihan seperti <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Peka (perempuan kepala keluarga) • Pelatihan prima (Perempuan Indonesia mandiri) • Pelatihan kewirausahaan 	Perempuan Wirusaha di desa semakin meningkat dengan didukung berbagai program pelatihan seperti <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kewirausahaan • Pelatihan pengasuhan anak • Pelatihan <i>public speaking</i>
7	Mulai terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengasuhan yang baik, Dibuatnya fasilitas yang ramah anak seperti Lapangan bola ramah anak; pojok baca; dan taman bermain	Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengasuhan yang baik. Dibuatnya fasilitas ramah anak seperti Ruang baca ramah anak di desa, dan menggiatkan posyandu remaja yang diakomodir oleh Forum Anak dan Tenaga Kesehatan Desa
8	Tidak ada kekerasan perempuan Rata-rata petani, tidak banyak pekerja migran yang keluar negeri	Tidak ada kekerasan terhadap perempuan. Cukup banyak pekerja migran, namun dengan terbentuknya Satgas PMI menjadi lebih terkontrol oleh desa.
9	Tidak ada pekerja anak	Tidak ada pekerja anak
10	Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak).	Tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak).

Sumber : Hasil Penelitian (2024).

Implementasi DRPPA di Kabupaten Cirebon diformulasikan dengan program-program yang mendukung lingkungan yang baik untuk perempuan dan anak. Untuk mendukung lingkungan yang baik untuk anak diantaranya adanya forum anak. Forum anak ini merupakan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

suatu kegiatan meningkatkan hak anak. Setiap anak punya hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi, oleh karena itu di forum anak ini siap untuk melakukan kampanye tentang pemenuhan hak anak.

Salah satu kegiatan dari forum anak ialah posyandu remaja. Di posyandu remaja ini tidak hanya dilakukan pengukuran secara fisik, melainkan suka diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan-penyuluhan, misalnya dari UKS penyuluhan tentang NAFZA, penyuluhan tablet penamah darah, penyuluhan dari motekar tentang KTPA, dan penyuluhan-penyuluhan lainnya. Ada pula pelatihan keterampilan seperti membuat gelang dan membuat bros. Selain itu juga tersedianya ruang bermain ramah anak, tersedianya ruang baca ramah anak, dan lain sebagainya.

Adapun Pusat pembelajaran keluarga (puspaga) yang merupakan layanan satu pintu untuk masalah anak dan keluarga, dimana setiap permasalahan berkaitan dengan keluarga dikonsultasikan dan dicoba dicari penyelesaiannya, wadah belajar bersama bagi orang tua anak dalam pengasuhan anak dan membangun keluarga berkualitas. Contohnya berkaitan dengan anak, misalnya anak yang males sekolah, anak yang ngeyel, puspaga siap memberikan upaya untuk meningkatkan dukungan kesehatan mental sebagai konselor; meskipun ini secara kuantitas masih terbatas.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung lingkungan yang baik untuk perempuan, diantaranya ialah kegiatan pemberdayaan ekonomi. Hal yang sangat dirasakan oleh masyarakat ketika adanya peningkatan yang baik di dalam pengetahuan dan juga *skill* dari pelatihan peningkatan ekonomi yang telah dilakukan, seperti diantaranya pelatihan kewirausahaan. Contoh yang sudah dilakukan seperti pelatihan membuat kue, latihan menjahit, tentunya ini adalah bekal untuk masyarakat di mana mereka bisa memproduksi produk komoditas. Praktik baik dari pelatihan-pelatihan ini berdampak baik, salah satunya mereka sudah bisa menghasilkan suatu produk sendiri.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang

kewirausahaan dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Hal ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan keterampilan jiwa *entrepreneurship* serta menciptakan kemandirian dalam berusaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka kondisi secara umum mengenai capaian 10 indikator DRPPA dari kedua desa (Desa Purbawinangun dan Desa Babakan Gebang) telah diupayakan dan hampir terpenuhi seluruhnya, akan tetapi dari informasi dan data yang tersedia, beberapa indikator belum dapat dipresentasikan. Selain itu, untuk mendapat hasil yang optimal masih perlu didukung dengan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan-kegiatan DRPPA.

Komunikasi Pembangunan

Pada bagian ini mendiskusikan mengenai komunikasi pembangunan dengan mengacu pada Armawan (2021), bahwa indikator strategi komunikasi pembangunan yang efektif dilakukan dengan beberapa langkah antara lain: adanya *planning* yang matang, menentukan sasaran dan tujuan penyampaian pesan, pembentukan pesan yang sesuai tujuan, pemilihan jenis media yang efektif dan sesuai sasaran serta melakukan evaluasi akhir dari hasil strategi yang dilakukan.

Dalam membangun Indonesia yang lebih baik dalam hal pengembangan model DRPPA perlu menerapkan komunikasi pembangunan yang kolaboratif, diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terlibat. Komunikasi yang terlibat dalam implementasi DRPPA adalah DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Kepala Desa, Relawan SAPA, Organisasi perempuan desa (Kader PKK, Posyandu), *stakeholders* DRPPA termasuk perempuan dan anak di desa. Masing masing pelaku memiliki peran dalam komunikasi pembangunan dan dengan berkoordinasi satu sama lain saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi (Budi, 2019) untuk mencapai tujuan program.

a. *Planning* yang Matang

Perencanaan untuk program DRPPA di Cirebon mencakup penetapan tujuan program yaitu

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

untuk memberdayakan, memberikan perlindungan serta mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di desa. Hal ini dilakukan diawali dengan menganalisis kebutuhan dari masyarakat setempat serta potensi dari sumber daya yang kemudian dituangkan dalam rencana jangka pendek dan menengah. Adapun sumber pendanaan untuk desa *pilot project* diberikan stimulan dari pusat dan untuk keberlanjutan program ini dianggarkan dari Dana Desa. Kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan mulai diagendakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas perempuan dan anak di desa.

Adapun strategi yang dilakukan oleh desa dalam rangka mewujudkan DRPPA ini agar senantiasa programnya berjalan berkelanjutan ialah dengan terus membina garda terdepan dari DRPPA itu sendiri, yakni Relawan SAPA, memperkuat program tersebut dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) program-program yang telah dilakukan, dan diupayakan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

b. Menentukan sasaran

Identifikasi audiens pada setiap kegiatan dalam program DRPPA di Cirebon ini dilakukan agar tepat sasaran. Pemerintah desa Bersama relawan SAPA mengawalinya dengan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak, serta edukasi mengenai kekerasan baik yang dilakukan pada saat pertemuan PKK, posyandu ataupun kunjungan ke sekolah-sekolah. Dengan cara tersebut masyarakat semakin terbuka dan mau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Peran kepada desa/kuwu menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mengkomunikasikan program DRPPA. Meskipun demikian, berbagai pihak juga dilibatkan untuk mendukung penyebaran pesan.

c. Pembentukan pesan yang sesuai dengan tujuan

Pembentukan pesan yang sesuai dengan tujuan dalam program DRPPA melibatkan pemahaman tujuan program, pengenalan target audiens (perempuan dan atau anak), pesan inti dan khusus mengenai DRPPA dikemas dengan menggunakan bahasa dan

gaya komunikasi yang yang dipahami oleh masyarakat desa. Kemampuan verbal yang baik dari kepala desa dan relawan SAPA mendukung tersampainya setiap pesan yang baik.

d. Pemilihan jenis media yang efektif dan sesuai sasaran

Berbagai kegiatan dalam DRPPA dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial seperti *Instagram* dan *Whats App*. Dua aplikasi ini dipandang sesuai karena banyak dipergunakan oleh masyarakat desa setempat dari setiap kalangan (tua dan muda). Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi program dari Kementerian sendiri disampaikan melalui *zoom meeting* yang cukup intens dilakukan.

e. Melakukan evaluasi akhir

Monitoring dan evaluasi DRPPA dilakukan oleh Kementerian pada tahun pertama di-*launching*-nya program DRPPA ini, didampingi oleh DP3KAB Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya monitoring dilakukan oleh DPPKBP3A Kabupaten Cirebon. Meskipun demikian salah satu desa *pilot project* merasa bahwa monitoring dan evaluasi ini kurang intens dilakukan sehingga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta penyesuaian strategi di masa depan.

Peran Pentahelix

Implementasi Program DRPPA melibatkan elemen-elemen pentahelix yang saling bersinergi. Selanjutnya akan dijelaskan peranan dari pentahelix.

a. Peran Pemerintah

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan panduan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan dalam pelaksanaan DRPPA. Peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pelayan Masyarakat. Pemerintah memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat termasuk untuk perempuan dan anak. Baik di tingkat pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Dinas yang

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

membawahi urusan perempuan dan anak baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Pelayanan dalam penanganan kasus secara khusus diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) P5A yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi masyarakat di tingkat kecamatan. Adapaun dalam implementasi DRPPA ini turut berkoordinasi dengan polsek, koramil dan juga DPMD. Selain itu, dengan adanya DRPPA pelayanan bagi perempuan dan anak dapat diberikan di desa dengan didukung oleh keberadaan relawan SAPA/Sahabat Perempuan dan Peduli Anak.

Kedua, Fasilitator. Pemerintah membentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, menyediakan fasilitas infrastruktur yang mendukung implementasi DRPPA, memberikan program pemberdayaan dan pelatihan bagi perempuan dan anak sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah mendorong tiap kabupaten/kota untuk mengimplementasikan DRPPA. Meskipun demikian di Cirebon masih belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan oleh DPPKBP3A Kabupaten Cirebon diantaranya bekerja sama dengan para camat agar penyampaian terhadap desa dapat maksimal sehingga DRPPA ini bukan hanya diimplementasikan di desa sebagai *pilot project* saja tetapi dapat dikembangkan secara bertahap di desa lainnya.

Ketiga, Pengawasan. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam implementasi DRPPA untuk melihat capaian keberhasilan DRPPA di desa serta mengevaluasi berbagai hambatan yang ditemukan dalam implementasi DRPPA.

b. Peran Masyarakat

Keberhasilan DRPPA tidak lepas dari kehadiran relawan SAPA; sebagai garda terdepan dalam implementasi DRPPA. Adapun peran yang dilakukan yaitu untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak

melalui berbagai program, diantaranya dengan memberikan konseling bagi perempuan dan anak serta terlibat dalam berbagai program desa yang menjadikan perempuan dan anak sebagai sasaran kegiatannya. Misalnya kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, lokakarya, forum diskusi, forum kreativitas, dan lain sebagainya.

Menurut Kepala Bidang Perempuan DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, sebelumnya para relawan SAPA mengikuti Pendidikan dan Pelatihan oleh KemenPPA yang dibantu oleh DPPKBP3A Cirebon, Kepala Desa dan aparat desa/kelurahan, para fasilitator nasional dan fasilitator daerah, dan juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Para relawan ini aktif mendampingi masyarakat. Beliau menambahkan dengan terbentuknya relawan SAPA diharapkan setiap lapisan masyarakat di desa dan perangkat desa memiliki kemauan dan membangun komitmen bersama mewujudkan sistem pembangunan dan pemerintahan desa/kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak.

Dampak positif dengan adanya keberadaan relawan SAPA yaitu masyarakat di desa yang lebih berani untuk bercerita mengenai berbagai masalah yang tidak dapat mereka pecahkan sendiri, baik yang terjadi dalam rumah tangga ataupun lingkungan sekitar. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat pada relawan SAPA di desa mulai terbangun.

Dalam menjalankan tugasnya, relawan SAPA dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPPKBPPA, DPPKA, kecamatan, Polsek, Koramil dan lainnya; disesuaikan kasus yang ditangani.

c. Peran Swasta

Dalam mengimplementasikan DRPPA dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak; termasuk sektor swasta. Sektor swasta atau pelaku usaha bisa dikatatakan mitra penting pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Namun, dalam pengimplementasian DRPPA ini belum banyak pihak swasta yang terlibat. Baru ada perusahaan Indomaret yang turut berkontribusi dalam hal memfasilitasi spanduk

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

jika desa akan melakukan sosialisasi ataupun pelatihan.

d. Peran Akademisi

DRPPA yang ideal perlu melibatkan akademisi yang dapat berperan sebagai fasilitator. Kontribusinya diberikan melalui kegiatan sosialisasi edukasi pada masyarakat terkait pemberdayaan perempuan ataupun perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Fenomena yang terjadi di Cirebon, telah ada beberapa Lembaga Pendidikan serta Perguruan Tinggi yang turut berkontribusi, diantaranya yaitu Poltekesos Bandung, *Smeru Research Institute*. Institut Perempuan.

Poltekesos Bandung turut serta mendukung implementasi DRPPA. Salah satu dosen diantaranya ada yang juga merupakan fasilitator nasional DRPPA, oleh karena itu poltekesos Bandung beberapa kali terlibat.

Smeru Research Institute berperan aktif dalam melakukan penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan penelitian menyoroti dampak program dan kebijakan pemerintah serta mengomunikasikan hasil temuan penelitian kepada publik dan pemangku kebijakan terkait. Isu-isu yang pernah dijadikan penelitian oleh *Smeru Research Institute* diantaranya mengenai kesetaraan gender: Kampanye publik dan program edukasi yang mana dapat membantu mengurangi diskriminasi dan stereotip terhadap perempuan.

e. Peran Media

Media digunakan dalam mempromosikan serta mensosialisasikan DRPPA dan kegiatan-kegiatan terkait yang telah dilakukan. Kementerian memanfaatkan zoom meeting dan juga *whatsapp* dalam mensosialisasikan program kepada pihak dinas maupun pihak desa. Bahkan dengan memanfaatkan media tersebut koordinasi dan komunikasi intens dilakukan. Namun, jika dalam hal mempromosikan atau mensosialisasikan program DRPPA kepada Masyarakat, kedua desa tersebut belum mengoptimalkan fungsi utama dari media sebagai sarana promosi dan sosialisasi DRPPA.

Sinergi antara peran Pentahelix yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor bisnis, dan media dalam komunikasi pembangunan dapat memperkuat efektivitas upaya pembangunan yang berkelanjutan.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Komunikasi pembangunan dalam mewujudkan DRPPA di Kabupaten Cirebon dapat dikatakan sudah baik. Terbukti dari dua desa yang dijadikan *pilot project* telah mengimplementasikan DRPPA dengan capaian 10 indikator DRPPA yang hampir seluruhnya terpenuhi. Hal ini juga didukung oleh kepemimpinan, koordinasi, serta komunikasi yang baik dari Kepala Desa/kuwu dengan *stakeholders* terkait; dengan melibatkan Relawan SAPA sebagai garda terdepan.

Namun demikian, agar lebih optimal Pemerintah Desa Purbawinangun perlu berupaya untuk meningkatkan indikator kesadaran masyarakat mengenai pola pengasuhan yang baik. Sedangkan, Pemerintah Desa Babakan Gebang perlu meningkatkan keterwakilan perempuan di desa. Selain itu, untuk keberlanjutan program ini diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan komitmen dari berbagai pihak, serta kerja sama melalui pendekatan Pentahelix; terutama dari sektor swasta untuk memberikan kontribusi finansial, serta optimalisasi peran media dalam meningkatkan kesadaran dan membentuk opini positif di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dukungan pendanaan yang telah diberikan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih pula untuk berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, diantaranya DP3AKB Provinsi Jawa Barat, DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Pemerintah Desa Purbawinangun, dan Pemerintah Desa Babakan Gebang.

REFERENSI

- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Ahmad, F., Taryono, O. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. *Jurnal Wacana Kinerja*, 24 (2), 61 – 84. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v24i2.701>
- Annisya, N.M.O., Novira. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26 (1), 29-50. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810>.
- Ansori, A. N. Al. (2021). *Bangun Indonesia dari Desa, KemenPPPA Kenalkan Program DRPPA - Page 4 - Health Liputan6*. <https://www.liputan6.com/health/read/4578049/bangun-indonesia-dari-desa-kemenpppa-kenalkan-program-drppa?page=4>
- Armawan, I. (2021). Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat . *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 1(2), 84–95. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v1i2.498>
- Budi, S. (2019). *Komunikasi Bencana : Aspek Sistem (Koordinasi , Informasi dan Kerjasama). 1*, 363–372.
- Damayanti, A., Ramdani, D. F., Gedeona, H. T., & Mursalim, S. W. (2023). Strategi Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus pada Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0*, 7(1), 257–263.
- Fatimah, N., Yusroh, M., & Musyarofah, A. (2023). Aktualisasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai Strategi Akselerasi Pencapaian SDGs Desa Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. *Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–11.
- Fitrah, E. (2024). *Yuk, Dukung Pembangunan Desa yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui DRPPA – tatkala*.
- Ghofar. (2022). *DPPKBP3A Pilih Dua Desa jadi Pilot Project DRPPA*. <https://fajarcirebon.com/dppkbp3a-pilih-dua-desa-jadi-pilot-project-drppa/>
- Iyoega, R. R. (2022). *Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik Lahan Pertanian antara Masyarakat dengan Korporasi Properti Communication in Resolving Agriculture Land Conflict Between Community and Property Corporation. Vol 6, No*, 480–484.
- Iyoega, R. R., Trilestari, E. W., & Kirana, C. A. D. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *PERSPEKTIF*, 9(1), 55–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>
- Jdih.kemenpppa.go.id. (2021). *Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. *Journal of Business Theory and Practice*. <http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/gloria/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077> Tarita Syavira Alicia.pdf?
- Josua, N. P. (2023). *Urgensi Rekaman Kegiatan sebagai Keterbukaan Informasi Publik pada Program Pembangunan Pemerintah Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Politeknik STIA LAN Jakarta The Urgency of Recording Activities as Public Information Disclosure in the Su. Vol 7, No*, 222–226.
- Juliasih, L., Kustiara, S. S., & Pasciana, R. (2023). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa

- Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 353-363. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i2.7752>
- Kurniawan, I., Asri, M.D., Fitriani, L., Priatna, R. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Rancakalong. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4 (2), 73-83. <https://doi.org/10.31113/setiamengabdikan.v4i2.50>
- Naufal, M. (2004). *1.290 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan & Anak Selama 2023*.
- Novira, A., Suherman, N.P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7 (1), pp. 170 - 175.
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Puspaningrum, D., Aji, J. M. M., Subekti, S., & Fauziah, D. (2023). Komunikasi Pembangunan Dalam Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Drppa) Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 7(1), 255. <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2948>
- Puspitasari, A. S., & Novira, A. (2022). Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 6(2), 108-118. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.879>
- Rangkuti, S.A., Kurniawan, I. (2022). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Wacana Kinerja*, 25 (2), 201-222. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v25i2.763>
- Rosalin, L. N., andayani, R., Wikantosa, B., Misiyah, & Zulminarni, N. (2021). *20230706143227_PANDUAN_FASILITA_SI_DESA_RAMAH_PEREM_231201_054232(1).pdf*.
- Setiadi, H., Silitonga, M., & Sutrisno, E. (2023). The strategy of the election supervisory agency in the west java region in increasing community participatory supervision. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(01), 109-122. <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7670>
- Simarmata, N.Y., Sutrisno, E. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 2, 37 - 48.
- Sumarwan, E., Kartika, T., Fitria, N., Axelfa Tri Aprilia, A., & Nurwan Indriani, A. (2024). Instagram Sebagai Media Komunikasi Pembangunan Pemerintah: Studi Pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 Instagram as Government Development Communication Media: A Study of the 2022 Regional Development Award Winners. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(02), 2023-2124. <https://doi.org/10.46937/21202350795>